

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan perekonomian terbesar di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan politik dan ekonomi global. Dengan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang penting di jalur perdagangan internasional, serta status sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relative stabil, Indonesia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam menghadapi dinamika global. Perubahan tatanan ekonomi dunia, ketergantungan terhadap negara yang maju, serta fluktuasi geopolitik internasional menuntun Indonesia untuk mencari wadah kerja sama yang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Dalam konteks ini, BRICS, yang merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi aliansi strategis yang berupaya memperkuat posisi negara – negara berkembang dalam tatanan ekonomi dan politik dunia, dimana BRICS ini diinisiasi oleh Rusia.¹ Dengan populasi gabungan yang mencapai hampir 40% dari populasi global dan kontribusi ekonomi yang signifikan, BRICS berperan sebagai platform untuk mendorong reformasi lembaga keuangan internasional dan mempromosikan kerja sama Selatan – Selatan (South south Cooperation). BRICS pada awalnya dikenal sebagai BRIC, sebuah istilah yang diperkenalkan pada tahun 2001, oleh seorang ekonom Goldman Sachs, asal Inggris, yaitu Jim O'Neill. O'Neill dalam Jurnal nya mengatakan *"We are currently forecasting 1.7% world GDP growth in 2002 with Brazil, Russia, India and China (BRICs) each set to grow again by more than the G7"*,² memprediksi ada 4 negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China.³ Dan ia juga

¹BRICS Portal ,*History Of Brics*, <https://infobrics.org/page/national-rubrics/> diakses pada tanggal 25 November 2024

²Jim O'Neill, *Building Better Global Economic BRICs*, Global Economics Paper No. 66 (London: Goldman Sachs, 2001), h.3

memprediksi bahwa keempat negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi besar di abad ke 21 bahkan bisa mengalahkan negara-negara G7. Dalam statement yang disampaikan O'Neill ia mengukur potensi besar negara – negara ini berdasarkan ukuran populasi, Tingkat pertumbuhan ekonomi, serta peran strategisnya di Kawasan masing – masing. Sebagaimana yang di kata O'Neill dalam bukunya :

“In November 2001 paper, I showed via simple ekxtrapolation that as soon as 2010 the combined GDP of the four BRIC countries was likely to become a bigger share of the world’s GDP under almost any assumptions.i presented four different scenarios for how the decade could evolve, and demonstrated how BRICs’ combined GDP was likely to increase to anywhere between 9 percent and, more probably, over 14 percent of the world total. It seemed quite clear to me then that, under any of the four scenarios, they should play a bigger role in global decision making. In fact, it seemd obvious that I wondered why no one else had thought of it.”⁴

Maksud dari pernyataan O'Neill adalah bahwa sejak tahun 2001, ia telah memperkirakan bahwa negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki peran yang semakin besar dalam perekonomian global.

Melalui analisisnya, ia menunjukkan bahwa pada tahun 2010, gabungan PDB negara-negara BRIC kemungkinan akan meningkat secara signifikan, mencapai antara 9% hingga lebih dari 14% dari total PDB dunia. Ia juga menekankan bahwa dalam skenario apa pun, BRIC akan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin berpengaruh dan seharusnya mendapat peran lebih besar dalam pengambilan keputusan global.

Pada tahun 2006, merupakan pertemuan perdana dari keempat negara ini, di mana pada saat itu Menteri luar negeri Brazil, Rusia, India, dan China bertemu di sela-sela sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Di New York. Pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama formal antar negara BRIC (Brazil, Rusia, India, China), yang dimana pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan KTT BRICS pertama, yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Yekaterinburg, Rusia, yang secara resmi menandai berdirinya kelompok BRIC sebagai forum

⁴Jim O'Neill, *The Growth Map: Economic Oppurtunity In the BRICs and beyond*, (New York: Penguin Group (USA) inc, 2011), h.27

internasional.⁵ Lalu, pada tahun 2010 bergabungnya anggota kelima ke dalam Empat kekuatan ekonomi utama dunia yang sedang berkembang, yang dikenal dengan akronim BRIC merujuk pada Brasil, Rusia, India, dan China, kini menyebut diri mereka BRICS. Huruf kapital "S" pada BRICS melambangkan Afrika Selatan (South Africa), yang secara resmi bergabung dengan keempat negara tersebut pada 24 Desember, membawa Afrika masuk ke dalam organisasi penting ini yang terdiri dari kekuatan global yang sedang naik dari Asia, Amerika Latin, dan Eropa.⁶ Pembentukan dari BRICS sendiri juga di latarbelakangi oleh faktor seperti :

Pertama, Dominasi dolar AS sebagai mata uang Cadangan global selama beberapa dekade terakhir telah memberi Amerika Serikat keunggulan dalam sistem keuangan internasional. Karena dengan penggunaan Dolar, Amerika memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan khususnya ekonomi global dan sanksi keuangan.⁷ BRICS merasa bahwa ketergantungan pada dolar Amerika membuat negara mereka sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan juga kebijakan ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri.

Kedua, berkaca dari kasus Subprime Mortgage pada tahun 2008 di Amerika Serikat, *Subprime mortgage* berarti pinjaman kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk meminjam dengan tingkat bunga yang lebih tinggi di atas bunga normal⁸. Singkatnya, *subprime mortgage* ini ialah pinjaman rumah atau kredit pemilikan rumah/KPR yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki Riwayat kredit buruk/ penghasilan yang tidak stabil. Karena resikonya yang tinggi, bank mengenakan bunga yang besar. Dorongan mencari keuntungan serta regulasi pemerintah yang mendukung kepemilikan rumah membuat bank

⁵BRICS Joint Statement (2009): Yekaterinburg Summit Declaration, <http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html> diakses pada tanggal 05 Desember 2024

⁶Jack A. Smith, *BRIC Becomes BRICS: Changes on the Geopolitical Chessboard*, Foreign Policy Journal, Januari 21, 2011, <https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/21/bric-becomes-brics-changes-on-the-geopolitical-chessboard/#comments>

⁷Elayne Selma Ashara dkk, "Dampak Kerjasama BRICS terhadap dominasi nilai dolar Amerika Serikat (AS) Tahun 2022", *Diplomacy And Global Security Journal* Vol 01, No 1 Tahun 2024, h.304

⁸Kalfi Mahendra (2016), *Pengaruh Krisis Subprime Mortgage Amerika Serikat terhadap Perbankan Syariah Muamalat Indonesia 2006–2009*, *Jom FISIP* Vol. 3 No. 1, h.1

memperluas pinjaman, termasuk ke kelompok berpenghasilan rendah. Akibat banyak nasabah yang gagal untuk membayar pinjaman tersebut, bank mengalami kebangkrutan, harga properti anjlik, dan kerugian merembet ke seluruh dunia karena dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional.

BRICS bertujuan untuk memperkuat perdagangan dan investasi di antara anggotanya, menciptakan peluang Pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi. Dan BRICS berkomitmen untuk menciptakan perubahan dalam tata Kelola ekonomi global, dan menjadikannya lebih adil dan inklusif. Yang dimana saat ini tata Kelola ekonomi global masih cenderung didominasi oleh kekuatan barat, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.⁹ Hingga saat ini, BRICS terus berperan sebagai platform strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, tidak hanya pada ekonomi global namun juga geopolitik, dengan memberikan kesempatan pada negara – negara berkembang bisa ikut andil bahkan memberikan pengaruh pada forum – forum internasional.

Pada 22-24 Oktober 2024, diadakan KTT BRICS yang ke-16 di Kazan Rusia, yang mengusung tema “*BRICS and Global South : JointBuilding of a better world*”. Yang menyoroti fokus organisasi tersebut dalam menciptakan tatanan global yang adil dan setara dimana semua negara memiliki suara. Dalam KTT ini BRICS mengundang beberapa negara sebagai mitra BRICS antara lain, ada Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Bahrain, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan lain lain. Dalam KTT BRICS ini Indonesia yang diwakili oleh Menlu Sugiono atas utusan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia sempat mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan BRICS, namun pada saat itu Indonesia masih mengkaji perihal keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diterima Indonesia apabila bergabung dengan BRICS¹⁰, Negara merasa tidak

⁹Adrian Maulana dkk, “*BRICS: Tantangan dan Peluang Dalam Tata Kelola Global*”, Jurnal Transborder, Vol.8 No.1 (Desember 2024), h.42

¹⁰Jayanti dkk, “*Peran Politik Bebas Aktif Dalam Kerja Sama Ekonomi Dunia : Studi Kasus Indonesia Bergabung Dalam Forum Internasional BRICS*”, Jurnal Multidisiplin Inovatif, Vol.8 No 11 (November 2024), h.103

ingin terburu-buru untuk memutuskan. Dan salah satu alasan utama Indonesia pada saat kepemimpinan Joko Widodo adalah prinsip diplomasi yang dianut oleh Indonesia yaitu Prinsip bebas aktif, yang berarti Indonesia dalam diplomasinya tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrim terhadap salah satu blok kuasa. Karena BRICS yang di inisiasi oleh Rusia yang notabenenya adalah sebagai pemimpin blok timur, menjadikan kekhawatiran Indonesia sendiri untuk bergabung pada masa itu, karena akan dianggap berpihak pada salah satu kubu. Indonesia sendiri dikenal cukup aktif dalam forum - forum ekonomi Internasional seperti forum G7 & G20.

Maka pada saat itu Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil Keputusan untuk bergabung. Namun Berbeda pada saat ini, yakni pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam forum atau organisasi internasional BRICS. Sebagaimana alasan utama pemerintahan sebelumnya Indonesia tidak bisa bergabung karena prinsip bebas aktif, justru pada masa Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan unik, dilansir dari BBC News Indonesia, Menlu Sugiono mengatakan bahwa “bergabungnya Indonesia kedalam BRICS merupakan pengejawantahan Politik luar negeri bebas aktif, Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum” hal ini juga di perkuat oleh pidato Presiden Prabowo Subianto pada saat usai di lantik yang menekan kan “memilih jalan bebas aktif nonblok” dan “menjadi sahabat semua negara” ¹¹. Yang berarti bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS adalah bentuk implementasi prinsip bebas aktif itu sendiri karena ikut serta dan berperan aktif di semua forum internasional tanpa memihak salah satu kubu tertentu.

Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh organisasi aliansi ekonomi dan geopolitik BRICS Bersama dengan beberapa negara lainnya. Pengumuman ini disampaikan oleh Brazil selaku ketua BRICS saat ini, yang juga

¹¹BBC News Indonesia, “Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS?- Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o> (Diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 22:02)

menandai pertama kalinya negara Asia Tenggara bergabung dengan organisasi BRICS.

Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS memiliki Peluang dan tantangan tersendiri, baik itu dari segi politik dan ekonomi. Seperti yang bisa Penulis lihat BRICS merupakan kelompok ekonomi berkembang yang secara kolektif memiliki pengaruh yang besar dalam tatanan global. Bergabungnya Indonesia kedalam BRICS membawa Indonesia ke dalam kekuatan ekonomi dan politik yang baru. Dari sisi Politik, Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat meningkatkan eksistensi serta memperkuat posisi diplomatiknya di dunia internasional, serta meningkatkan pengaruh politik dan mendapat dukungan dalam berbagai isu global.¹² Dari segi ekonomi, BRICS bisa menjadi platform strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara besar yang dapat membuka akses pasar baru dan peningkatan peluang ekspor, terutama China dan India yang merupakan pasar yang sangat besar bagi komoditas utama Indonesia seperti, Batu bara, minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan produk pertanian lainnya, ini menjadi kesempatan Indonesia meningkatkan volume ekspor ke negara-negara BRICS¹³.

Indonesia juga dapat menarik investasi asing dari negara–negara anggota untuk membangun infrastruktur dan sektor penting lainnya, dan juga membuka peluang untuk mengakses teknologi dari negara–negara besar seperti Rusia dan China di bidang energi, pertahanan dan digital. Salah satu gebrakan dari BRICS dari sisi ekonomi ialah pembentukan NDB (*New Development Bank*), bank ini menjadi alternatif sumber pendanaan bagi negara-negara anggota yang ingin meminjam dana untuk Pembangunan negaranya masing-masing dan tentunya dengan syarat yang mudah dan tidak memberatkan seperti bank IMF dan World Bank. Potensi dan peluang yang bisa Indonesia dapatkan dari bergabungnya ke dalam BRICS sebagai anggota penuh,

¹²Surya Bakti dkk, “Indonesia dalam BRICS : Dampak bagi perekonomian Nasional”, Jurnal Kalianda Halok Gagas, Volume 8, No 1 (Januari 2025), h.68

¹³Muslim dkk, “Strategi Dan Peluang Indonesia dalam Kerja sama BRICS untuk memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional”, Jurnal Keamanan Nasional Vol.X No. 2 (2024), h.221

Akan tetapi, berbagai peluang yang ditawarkan oleh keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak serta-merta dipandang sebagai langkah yang sepenuhnya aman dan menguntungkan. Sejumlah akademisi dan pakar ekonomi politik internasional justru mengingatkan bahwa kerja sama dalam forum negara-negara berkembang seperti BRICS berpotensi melahirkan bentuk ketergantungan baru apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas domestik yang memadai. Dalam perspektif ekonomi politik kritis, pergeseran orientasi kerja sama dari Barat ke BRICS tidak selalu berarti pembebasan dari struktur ketimpangan global, melainkan bisa berubah menjadi perpindahan pusat ketergantungan dari satu kekuatan hegemonik ke kekuatan hegemonik lainnya.

Joseph E. Stiglitz, dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* menyatakan bahwa “*even when not guilty of hypocrisy, the West has driven the globalization agenda, ensuring that it garners a disproportionate share of the benefits, at the expense of the developing world.*”¹⁴ Pernyataan ini mengingatkan bahwa sistem ekonomi global baik yang didominasi oleh negara-negara Barat maupun yang diklaim sebagai alternatif tetap mengandung risiko ketimpangan struktural apabila negara berkembang hanya ditempatkan sebagai penerima modal dan teknologi tanpa memiliki kontrol atas nilai tambah serta arah pembangunan nasionalnya. Dalam konteks tersebut, keterlibatan negara berkembang dalam skema kerja sama internasional kerap menempatkan mereka pada posisi subordinat, di mana keuntungan utama dari integrasi ekonomi global tetap dinikmati oleh negara-negara yang memiliki keunggulan modal, teknologi, dan kapasitas industri.

Lebih lanjut, Immanuel Wallerstein¹⁵ dalam teori *world-systems* menegaskan bahwa negara-negara yang berada pada posisi *semi-periphery* seperti Indonesia berada dalam kondisi rentan karena berada di antara ambisi untuk naik kelas menjadi negara inti dan realitas ketergantungan pada modal serta teknologi negara yang lebih kuat. Dalam kerangka ini, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak

¹⁴ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W.W. Norton & Company, 2002), hal.7

¹⁵ Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction* (Durham and London: Duke University Press, 2004), 29.

secara otomatis mengubah posisi struktural tersebut, terutama apabila sektor-sektor strategis nasional masih didominasi oleh investasi dan teknologi asing. Alih-alih memperkuat kemandirian, kerja sama internasional justru berpotensi mengunci negara berkembang dalam struktur nilai tambah rendah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kondisi ini memunculkan persoalan normatif yang tidak sederhana. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. Jika keikutsertaan Indonesia dalam BRICS pada praktiknya memperkuat ketergantungan terhadap modal dan teknologi negara lain, maka muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dengan demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS menghadirkan dilema kebijakan antara peluang strategis dan risiko struktural. Di satu sisi, BRICS diproyeksikan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global yang multipolar; di sisi lain, tanpa pengelolaan politik hukum yang cermat dan penguatan kapasitas domestik, keanggotaan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi dan keadilan yang menjadi fondasi konstitusional negara. Kontradiksi inilah yang menjadi titik tolak penting bagi penelitian ini untuk menelaah secara kritis potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS melalui perspektif siyasah dauliyah dan hukum tata negara. Berdasarkan hal ini, maka peneliti memberikan judul pada penelitian ini **“Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS?
2. Bagaimana Politik Hukum Indonesia pasca bergabung dengan BRICS
3. Bagaimana perspektif Siyasah Dauliyah terhadap potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Potensi arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS.
2. Untuk menganalisis politik hukum Indonesia pasca bergabung dengan BRICS, khususnya dalam kaitannya dengan arah kebijakan negara dalam bidang hubungan luar negeri, perjanjian internasional, dan pengelolaan kerja sama ekonomi global, serta kesesuaiannya dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menilai potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS dalam perspektif Siyasah Dauliyah, dengan menitikberatkan pada prinsip masalah, keadilan (al-‘adalah), dan kerja sama yang saling menguatkan (at-ta‘āwun), guna melihat apakah keanggotaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan kepentingan kemaslahatan rakyat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Teoritis Penelitian

1. Penelitian ini memberikan ruang kontribusi pada pandangan studi Politik Internasional Islam atau yang biasa di sebut sebagai Siyasah Dauliyah untuk memperkaya pemahaman tentang prinsip – prinsip Siyasah Dauliyah dalam konteks kebijakan luar negeri modern, terutama dalam keanggotaan Indonesia dalam organisasi BRICS. Hal ini dapat mengisi gap pengetahuan yang ada tentang bagaimana Organisasi ekonomi dan geopolitik yaitu BRICS bisa mempengaruhi kebijakan politik ekonomi negara – negara anggotanya terkhusus Indonesia. Penelitian ini juga menjadikan contoh bagaimana teori teori dari Siyasah Dauliyah atau Politik Internasional Islam bisa diaplikasikan kedalam analisis kebijakan kontemporer.

2. Studi ini dapat menjadi penambah wawasan bagi akademis dan peneliti yang merujuk kepada topik yang sama, seperti hubungan politik internasional dengan prinsip islam. Hal ini dapat membuka kesempatan untuk mengembangkan sebuah teori-teori baru yang mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang BRICS, yang tidak hanya berkaca pada kaca mata politik dan ekonomi barat, namun juga menghadirkan perspektif islam di dalamnya.

Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data dan analisis mendalam terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, serta rekomendasi ini juga dapat membantu pemerintah Indonesia untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat serta meminimalisir resiko dari keanggotaan Indonesia di dalam BRICS.
- b. Penelitian ini juga bisa dapat memberikan gambaran kepada pelaku ekonomi (Pengusaha, Investor, dan Lembaga Keuangan) tentang peluang dan tantangan yang mungkin akan timbul dari keanggotaan Indonesia dalam BRICS, sehingga memberikan informasi yang dapat membantu dalam menyusun strategi bisnis maupun investasi yang tepat pada target tujuan. Bagi masyarakat umum dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait implikasi keanggotaan BRICS bagi Indonesia baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga masyarakat paham bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Berpikir

Dalam memahami kebijakan Indonesia yang secara resmi telah bergabung ke dalam BRICS pada tanggal 06 Januari 2025, peneliti memandang bahwa persoalan ini tidak hanya bisa ditinjau dari aspek ekonomi dan politik global semata, tetapi juga dilihat dari perspektif kedaulatan nasional, keadilan internasional, dan masalah rakyat. Peneliti meyakini bahwa setiap kebijakan luar negeri termasuk kerja sama multilateral seperti BRICS harus mendukung kemandirian ekonomi, memperkuat posisi bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai

syariat Islam yang menjunjung keadilan (*Al'Adalah*) dan kerja sama dalam kebaikan (*At-Ta'wun*).

Untuk memverifikasi sikap dan pandangan tersebut, peneliti menggunakan Teori ekonomi politik internasional (IPE) dengan 3 pendekatan nya yaitu Mekantilisme, Liberalisme, dan Marxisme, yaitu untuk menelaah korelasi antara kekuatan politik dan kebijakan ekonomi negara dalam sebuah tatanan global, serta teori dependensi sebagai pisau analisis untuk mengkaji potensi ketergantungan baru terhadap kekuatan dominan dalam BRICS. Selain itu, peneliti menguatkan kerangka berpikir ini melalui prinsip-prinsip siyasah dauliyah, terutama nilai-nilai tolong menolong dalam kebaikan (teori *At-Ta'wun*) dan keadilan antarbangsa (teori *Al-'Adalah*), serta dalil *Syar'i* yakni Al-Quran dan Hadist, dan konstitusi negara seperti Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, UU No 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dan UU No 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, peneliti membangun paradigma penelitian bahwa kerja sama internasional BRICS hanya akan bermanfaat jika mampu menjamin adanya keadilan ekonomi, saling menguntungkan, serta menjaga kedaulatan negara. Paradigma ini menjadi dasar peneliti dalam menganalisis arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS, dan menilainya dari kacamata Islam melalui pendekatan siyasah dauliyah.

F. Permasalahan Utama (Problem Statement)

Penelitian ini berangkat dari dinamika keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang menandai babak baru dalam politikekonomi internasional Indonesia. BRICS sebagai blok negara berkembang dengan potensi besar dinilai dapat menjadi alternatif terhadap dominasi barat dalam tatanan ekonomi global. Namun, terdapat pertanyaan mendasar mengenai bagaimana arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS, apakah benar-benar mampu meperkuat posisi nasional dalam percaturan global atau justru menimbulkan tantangan baru terkait kedaulatan ekonomi dan indepedensi politik luar negeri.

Dari perspektif siyasah dauliyah, prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *at-ta'awun* (kerja sama) menjadi dasar penting untuk menilai apakah langkah Indonesia bergabung dengan BRICS sejalan dengan nilai-nilai islam dalam hubungan

internasional. Dengan demikian, problem statement dalam penelitian ini dirumuskan menjadi “bagaimana arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS ditinjau dari perspektif siyasah dauliyah, khususnya prinsip *aal-’adalah* (keadilan) dan *at-ta’awun* (Kerjasama)

G. Hasil Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Endjel Martilianis	Determinan Foreign Direct Investment di Negara BRICS Tahun 2011-2021	Penelitian ini lebih berfokus pada Foreign Direct Investment (FDI) sebagai faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi BRICS, sedangkan penelitian saya lebih luas mencakup arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS dari perspektif <i>Siyasah Dauliyah</i> .	Tidak mengaitkan kebijakan ekonomi BRICS dengan perspektif Islam, sedangkan penelitian saya meninjau bagaimana kebijakan ini relevan dalam kerangka politik Islam (Siyasah Dauliyah).

2	Tsaqifu Mu Tashim	Analisis Ekonomi Negara BRICS terhadap Emisi Karbondioksida (CO ₂)	a. Sama-sama meneliti negara-negara BRICS sebagai objek utama. b. Menggunakan pendekatan ekonomi dalam menganalisis dampak BRICS terhadap aspek tertentu. c. Memanfaatkan data ekonomi makro seperti Gross Domestic Product (GDP) dan Foreign Direct Investment (FDI) dalam analisisnya.	Penelitian ini lebih berfokus pada dampak kegiatan ekonomi BRICS terhadap emisi karbon dioksida (CO₂), sedangkan penelitian saya menganalisis potensi arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS.
3	Eko Nordiansyah	Dampak Bergabungnya Afrika Selatan ke BRICS terhadap Pertumbuhan Ekonomi	a. Sama-sama membahas dampak keanggotaan dalam BRICS terhadap ekonomi negara anggota.	Penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi bagi Afrika Selatan setelah bergabung dengan BRICS, sedangkan penelitian saya lebih menyoroti

		Afrika Selatan (2011-2013)	b.Menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis perubahan yang terjadi setelah suatu negara bergabung dengan BRICS. c.Memanfaatkan kajian literatur sebagai metode utama dalam penelitian.	arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS. Dan tidak membahas aspek politik Islam atau tinjauan kebijakan ekonomi dari sudut pandang Islam, yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya.
4	Fauziah Eka Putri	Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Negara BRICS	a. Sama-sama membahas negara-negara BRICS sebagai objek penelitian utama. b. Menggunakan pendekatan ekonomi dalam menganalisis dampak BRICS terhadap suatu aspek ekonomi. c. Memanfaatkan data sekunder sebagai sumber	Penelitian ini berfokus pada pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan, sementara penelitian saya membahas arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS. Dan Tidak mengkaji aspek politik dan tinjauan ekonomi Islam, sedangkan penelitian saya mengaitkan

			utama dalam penelitian.	BRICS dengan perspektif Siyash Dauliyah dan kebijakan politik ekonomi Islam.
5	Ryan Philip Azarya	Akibat Hukum Bergabungnya Indonesia dalam Aliansi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)	a. Sama-sama membahas potensi dampak keanggotaan Indonesia dalam BRICS b. Menggunakan pendekatan hukum dan menganalisis implikasi BRICS terhadap Indonesia c. Memiliki fokus terhadap dampak ekonomi	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada analisis politik ekonomi dalam perspektif siyash dauliyah. Penelitian ini berfokus pada perdagangan internasional indonesia dalam BRICS, sedangkan saya lebih melihat arah politik ekonomi Indonesia.